

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HARGA
(SIMAHAR) DALAM PENGUSULAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

TESIS

Oleh:

Aina Khilya Isna Shofia

22302091014



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

2024

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN HARGA
(SIMAHAR) DALAM PENGUSULAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

TESIS

Diajukan Kepada

Universitas Islam Malang

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar

Magister Administrasi Publik

Oleh:

Aina Khilya Isna Shofia

22302091014

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

2024

ABSTRAK

Aina Khilya Isna Shofia, Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga (SIMAHAR) dalam Pengusulan Standar Harga Barang dan Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat. Program Magister Ilmu Administrasi, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Dosen Pembimbing I: Prof. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Dosen Pembimbing II: Dr. Rulam Ahmadi, M.Pd

Perkembangan teknologi di era globalisasi menuntut transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga (SIMAHAR) dalam pengusulan standar harga barang dan jasa di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kutai Barat. SIMAHAR dirancang menggantikan proses manual yang kurang efisien untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana langkah dan strategi, peran aktor, hasil implementasi dan faktor penghambat implementasi aplikasi SIMAHAR. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci dan komprehensif langkah dan strategi, peran aktor, hasil implementasi serta faktor penghambat aplikasi SIMAHAR.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan Kepala Bidang Pengelola BMD, Kepala Sub Bidang Kebutuhan dan Penatausahaan, dan Staf Pelaksana di BKAD, Kepala Subag Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Kepala Bidang Penggerakan, Penyuluhan Advokasi dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat. Analisis data dilakukan secara sistematis untuk memahami implementasi dan faktor yang memengaruhi penerapan SIMAHAR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMAHAR memberikan dampak positif dengan mempercepat pengusulan standar harga, meningkatkan akurasi data, dan meminimalkan manipulasi. Sebelumnya, pengusulan dilakukan secara manual melalui hard copy dokumen, yang membutuhkan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Dengan SIMAHAR, usulan standar harga menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel, karena dokumen pembandingan harga serta link aktif wajib disertakan. Implementasi SIMAHAR melibatkan berbagai aktor dengan peran penting. BKAD sebagai pengelola aplikasi bertanggung jawab atas pelatihan dan pemantauan, sementara SKPD menginput data ke dalam sistem. Auditor internal memastikan akuntabilitas untuk menghindari kesalahan seperti markup harga. Meski demikian, implementasi menghadapi tantangan signifikan, termasuk kurangnya komunikasi antar-SKPD, minimnya pelatihan, ketidakstabilan jaringan internet, dan resistensi dari beberapa pengguna terhadap perubahan teknologi.

Strategi yang diterapkan meliputi pelatihan intensif, monitoring, dan sosialisasi untuk menyamakan persepsi antaraktor. SIMAHAR telah mampu menciptakan sistem pengelolaan harga yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip good governance. Namun, kendala seperti jaringan yang tidak stabil dan kurangnya inisiatif pengguna memerlukan perhatian lebih lanjut.

Kesimpulannya, SIMAHAR berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Kutai Barat. Untuk mencapai implementasi optimal, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan pelatihan, dan komunikasi antar-SKPD. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan aplikasi serupa untuk mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: SIMAHAR, Pengelolaan Keuangan, Digitalisasi, Efisiensi



ABSTRACT

Aina Khilya Isna Shofia, Implementation of the Price Management Information System Application (SIMAHAR) in Proposing Price Standards for Goods and Services at the West Kutai Regency Regional Financial and Asset Agency. Master's Program in Administrative Sciences, Postgraduate Program at Islamic University of Malang. First Advisor: Prof. H. M. Mas'ud Said, MM., Ph.D, Second Advisor: Dr. Rulam Ahmadi, M.Pd

Technological developments in the era of globalization require digital transformation in various sectors, including regional financial management. This research aims to analyze the implementation of the Price Management Information System (SIMAHAR) application in proposing price standards for goods and services at the Regional Financial and Asset Agency (BKAD) of West Kutai Regency. SIMAHAR is designed to replace less efficient manual processes to increase transparency, accountability and efficiency in budget management.

The focus of this research is the steps and strategies, the role of actors, implementation results and factors inhibiting the implementation of the SIMAHAR application. This research also aims to describe and analyze in detail and comprehensively the steps and strategies, the role of actors, implementation results and factors inhibiting SIMAHAR application.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through structured interviews with the Head of the BMD Management Division, Head of the Needs and Administration Sub-Sector, and Implementing Staff at BKAD, Head of the General Sub-Division of the Community and Village Empowerment Service, Head of the Mobilization, Advocacy and Family Information Division of the Population Control, Family Planning, Empowerment Service Women and Child Protection, West Kutai Regency. Data analysis was carried out systematically to understand the implementation and factors influencing SIMAHAR implementation.

The research results show that SIMAHAR has a positive impact by speeding up the proposal of price standards, increasing data accuracy, and minimizing manipulation. Previously, proposals were made manually via hard copies of documents, which took a long time and was prone to errors. With SIMAHAR, proposed price standards become more effective, transparent and accountable, because price comparison documents and active links must be included. The implementation of SIMAHAR involves various actors with important roles. BKAD as application manager is responsible for training and monitoring, while SKPD inputs data into the system. Internal auditors ensure accountability to avoid errors such as price markups. However, implementation faces significant challenges, including a lack of communication between SKPDs, minimal training, internet network instability, and resistance from some users to technological change.

The strategies implemented include intensive training, monitoring and outreach to equalize perceptions between actors. SIMAHAR has been able to create a price management system that is more structured and in accordance with the principles of good governance. However, obstacles such as unstable networks and lack of user initiative require further attention.

In conclusion, SIMAHAR plays an important role in increasing the efficiency and transparency of financial management in West Kutai Regency. To achieve optimal implementation, it is necessary to strengthen technological infrastructure, increase training and communication between SKPDs. This research can be a reference for other regions in developing similar applications to support digital transformation in regional financial management.

Keywords: SIMAHAR, Financial Management, Digitalization, Efficiency



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman sekarang semakin cepat, teknologi dan informasi juga semakin berkembang. Di Era Globalisasi dan digitalisasi ini menjadi menuntut setiap orang untuk mengikuti perkembangan zaman. Saat ini kita telah melewati Revolusi Industri 4.0 dan menuju ke era *Society* 5.0. Hal ini menuntut manusia untuk berkembang dan berpikir bagaimana caranya untuk mempermudah pekerjaan. Perlunya menguasai Ilmu Pengetahuan dan juga teknologi yang berkembang baik di dunia pendidikan, industri, marketing, bahkan di sektor pemerintahan menuntut adanya transformasi digitalisasi di segala bidang. Digitalisasi menjadi kewajiban untuk aktivitas zaman sekarang, Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menuntut semua orang untuk memanfaatkan teknologi digital dengan harapan untuk masa mendatang (Sandiasa & Agustana, 2018).

Menurut Rahadian (2019) upaya revitalisasi birokrasi termasuk dalam penataan kelembagaan, *good governance* merupakan referensi utama, terutama dalam membangun kolaborasi yang efektif antara 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan mengusung nilai-nilai kompetensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2022 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan suatu kunci yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Tanpa pengadaan barang/jasa, pembangunan tidak akan dapat berjalan

sehingga anggaran pemerintah daerah juga tidak terserap, sehingga masyarakat tidak menikmati hasil pembangunan. Hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menurunnya daya beli masyarakat. Dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik maka pembangunan dapat berjalan, anggaran pemerintah terserap dan perekonomian masyarakat juga akan meningkat.

Selama ini proses pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara konvensional, yaitu dilaksanakan secara langsung oleh pengguna barang dan jasa dengan pertemuan langsung antara pihak yang terkait dalam pengadaan barang atau jasa. Pengadaan secara konvensional memiliki banyak kekurangan yakni membutuhkan waktu lama, sehingga dipandang menyia-nyiakan waktu dan biaya, kurangnya informasi serta adanya kompetisi yang kurang sehat yang berakibat terhadap kualitas pengadaan, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu. Menurut Purwanto (2008) berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat diklasifikasikan sebagai berikut (a) minimnya monitoring; (b) penyalahgunaan wewenang; (c) penyimpangan kontrak; (d) kolusi antara pejabat publik dan rekanan; (e) manipulasi dan tidak transparan; (f) kelemahan SDM.

Implementasi adalah aspek yang sangat penting dalam proses kebijakan dan merupakan suatu upaya agar mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan sarana dan prasarana tertentu dalam urutan waktu tertentu. Pada umumnya implementasi yaitu upaya dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui suatu program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Anderson dikutip Leo Agustino (2016:7) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Pemerintah Indonesia menciptakan sistem informasi yang merupakan salah satu wujud dari penerapan Satu Data Indonesia yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai *good governance*. Peraturan tersebut merupakan kebijakan baru yang diterbitkan menyangkut pelaksanaan dan penggunaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan tujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengembangkan serta meningkatkan kualitas perencanaan anggaran secara efisien dan efektif.

Menurut Mas'ud (2007), tidak bisa dipungkiri jika sebuah negara atau sub-sistem pemerintahan telah berani mengintroduksi kegagapan teknologi atau kesenjangan digital (*digital divide*), hal itu akan membuka kesempatan yang luas bagi pencapaian pembaruan di subsistem yang lain. Hal ini berlaku bagi semua negara, seberapa pun level pembangunan ekonomi mereka, level pembangunan sumber daya manusia mereka dan apapun konteks sosial dan kultural yang ada dalam komunitas atau negara tersebut, jika bisa mengatasi GAPTEK (gagap teknologi) dan berani melawan cara-cara lama yang lamban dan birokratis maka harapan akan kemajuan lain akan tercapai.

Dalam menjalankan segala urusan yang ada di instansi pemerintah, diharapkan bagi pegawai mampu untuk memanfaatkan atau menggunakan aplikasi pendukung sehingga pelaksanaan maupun pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Terkait hal tersebut, dapat di lihat bahwa terdapat dua contoh daerah yang berhasil menggunakan sistem aplikasi, yang pertama adalah penelitian dari Khaerullah dkk (2023), tentang aplikasi Simbakda, yang mana aplikasi ini mampu meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bidang aset, karena aplikasi Simbakda dapat memudahkan, mempercepat keakuratan dalam mengelola barang dan kekayaan daerah Kota Makassar. Yang kedua adalah, penelitian dari Putu Ayu dkk (2021), kebijakan

penerapan SIMDA di Kota Mataram khususnya bagian umum sekretariat daerah, telah berhasil dan para pegawai merasa senang dengan adanya program tersebut. Kesesuaian hasil yang dihasilkan dengan menggunakan SIMDA memenuhi kriteria keuangan yang efektif.

Adanya *e-procurement* menjadi peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam pertanggung jawaban keuangannya. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Upaya tersebut diperlukan agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Sistem Informasi Manajemen Harga (SIMAHAR) merupakan aplikasi untuk penginputan usulan barang dan jasa yang sudah mulai diterapkan di BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Kutai Barat. Aplikasi ini diharapkan sangat membantu agar usulan standar harga barang dan jasa dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Untuk itu, peneliti disini sangat tertarik untuk meneliti mengenai usulan standar harga barang dan jasa di Kabupaten Kutai Barat, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi usulan standar harga sudah efektif atau belum dalam penerapan aplikasi tersebut. Mengingat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi adanya usulan harga barang dan jasa, yakni tidak adanya sinyal atau jaringan disana yang tidak stabil, kurangnya komunikasi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam

menetapkan operator yang menjadi pengusul standar harga melalui SIMAHAR, dan keengganan beberapa pengguna untuk mengikuti prosedur usulan standar harga. Hal tersebut yang menghambat usulan harga barang dan jasa. Untuk memastikan eksistensi penggunaan SIMAHAR, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelola BMD Bapak Agus Syaprani S.Hut., MP sebagai berikut: “Sebelum menggunakan aplikasi SIMAHAR, dalam pengusulan standar harga, BKAD Kabupaten Kutai Barat awalnya menerima usulan dalam bentuk hard copy dokumen yang kemudian diinput secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama. Namun setelah menggunakan aplikasi SIMAHAR, pengusulan standar harga menjadi lebih efektif dan efisien”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat menjadi sangat menarik untuk diteliti dengan judul “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Harga (SIMAHAR) Dalam Pengusulan Standar Harga Barang dan Jasa Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimaimana langkah-langkah dan strategi Implementasi SIMAHAR dalam Pengusulan Standar Harga Barang dan Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Kutai Barat?
2. Bagaimana peran aktor pada Implementasi Aplikasi SIMAHAR dalam Pengusulan Standar Harga Barang dan Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Kutai Barat?
3. Bagaimana hasil Implementasi Aplikasi SIMAHAR dalam Pengusulan Standar Harga Barang dan Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Kutai Barat?

4. Apa saja faktor penghambat Implementasi Aplikasi SIMAHAR dalam Pengusulan Standar Harga Barang dan Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci dan komprehensif langkah-langkah dan strategi implementasi aplikasi SIMAHAR dalam pengusulan standar harga barang dan jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci dan komprehensif peran aktor pada implementasi aplikasi SIMAHAR dalam pengusulan standar harga barang dan jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci dan komprehensif hasil implementasi aplikasi SIMAHAR dalam pengusulan standar harga Barang dan Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci dan komprehensif faktor penghambat Implementasi Aplikasi SIMAHAR dalam Pengusulan Standar Harga Barang dan Jasa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang administrasi publik dan lebih spesifik pada ilmu kebijakan publik (*public policy*), dalam hal ini memperkaya studi implementasi aplikasi pada pengusulan standar standar harga barang dan jasa. Diharapkan melalui penelitian ini akan diperoleh pemahaman-pemahaman baru mengenai implementasi aplikasi khususnya yang berkaitan dengan pengusulan standar harga barang dan jasa.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Serta sebagai wacana dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki tema sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Diharapkan menjadi masukan untuk instansi terkait dalam mengembangkan berbagai implementasi melalui sistem aplikasi pemerintah.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana bagi peneliti untuk memperluas dan mengetahui terutama dalam hal-hal penerapan sebuah implementasi melalui sistem aplikasi pemerintah.

1.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan, peraturan, atau program tertulis yang telah disahkan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, prosedur, dan teknik, serta ditujukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang terukur dalam rangka menciptakan perubahan positif sesuai dengan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan mencakup aspek komunikasi, alokasi sumber daya, disposisi sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung keberhasilannya.

2. Aktor-aktor implementasi merujuk pada individu atau kelompok yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan publik, dengan peran yang ditentukan oleh tingkat kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka. Aktor ini mencakup birokrat sebagai pelaksana tradisional hingga masyarakat sebagai pelaku utama dalam konteks tertentu. Dalam implementasi kebijakan, aktor dapat bertindak sebagai subyek dengan kepentingan tinggi namun kekuatan rendah, pemain kunci dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang tinggi, pengikut pasif dengan pengaruh yang rendah, atau pendukung dengan kekuatan tinggi tetapi kepentingan rendah. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada sinergi di antara aktor-aktor ini sesuai model yang relevan, mulai dari pemerintah dominan hingga masyarakat mandiri.
3. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif, melalui layanan berbasis elektronik yang mencakup pengolahan data, pengelolaan informasi, serta integrasi sistem antarinstansi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah, memperkuat partisipasi warga dalam proses pemerintahan, serta mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pengawasan berbasis teknologi. Implementasi *e-government* mencakup aspek teknis, seperti pengembangan platform terpadu dan monitoring berkala, serta aspek sosial, seperti penerimaan masyarakat terhadap layanan digital untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Standar harga barang dan jasa adalah serangkaian pedoman dan ketentuan yang mengatur penggolongan, kualitas, dan keseragaman barang atau jasa yang digunakan dalam proses pengadaan pemerintah, dengan tujuan memastikan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Standar ini meliputi penetapan

spesifikasi teknis dan prosedur yang memudahkan pengadaan, perawatan, serta logistik barang/jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh lembaga seperti LKPP. Implementasi standar ini mendukung kelancaran pembangunan nasional dan pengelolaan belanja pemerintah melalui pengadaan barang/jasa yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Aplikasi sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung fungsi manajemen dalam organisasi dengan menyediakan informasi yang konsisten, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Sistem ini mencakup pengelolaan data terkait aktivitas operasional, perencanaan, dan pengendalian organisasi, yang disajikan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, atau hasil simulasi. Dalam konteks pemerintahan, aplikasi sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan administrasi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, sebagaimana diatur dalam berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi aplikasi SIMAHAR oleh BKAD Kabupaten Kutai Barat mencerminkan transformasi dari metode manual menuju sistem digital dalam pengusulan standar harga barang dan jasa. Meski awalnya SKPD merasa nyaman dengan proses manual, langkah strategis seperti pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, pelatihan penggunaan aplikasi, dan monitoring intensif berhasil mengedukasi dan mendorong adopsi aplikasi ini. SIMAHAR meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengusulan harga dengan memastikan kepatuhan pada kaidah yang berlaku, meskipun menghadapi tantangan seperti adaptasi pengguna dan infrastruktur. Upaya ini menciptakan sistem yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Implementasi aplikasi SIMAHAR di BKAD Kabupaten Kutai Barat melibatkan berbagai aktor dengan peran penting dalam mendukung kelancaran pengusulan standar harga barang dan jasa. PBMD bertindak sebagai penyedia tools dan pengelola proses pengusulan, dibantu oleh tim pengembang aplikasi yang merancang sistem dan dashboard untuk menciptakan alur kerja yang transparan dan efisien. SKPD sebagai pengguna aplikasi berperan menginput data ke dalam sistem, sementara pegawai yang ditugaskan memastikan data yang diinput lengkap dan sesuai. Auditor internal mengawasi akuntabilitas dokumen untuk mencegah kesalahan seperti mark-up harga, dan Kepala Sub Bidang Kebutuhan dan Penatausahaan mengarahkan serta mengawasi

keseluruhan proses agar sesuai standar. Dengan peran-peran ini, SIMAHAR mampu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan standar harga.

3. Implementasi aplikasi SIMAHAR di BKAD Kabupaten Kutai Barat membawa perubahan signifikan dalam pengusulan standar harga barang dan jasa, menggantikan proses manual yang kurang efisien dengan pendekatan berbasis digital yang lebih terstruktur dan akuntabel. Sebelum SIMAHAR, penginputan dilakukan secara manual dengan tahapan panjang, seperti menerima dokumen hard copy dan memasukkan data ke dalam form Excel untuk diunggah ke SIPD. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga rentan terhadap kesalahan dan kurang mendukung akurasi serta akuntabilitas. Dengan SIMAHAR, pengusulan menjadi lebih transparan, karena dokumen pembanding harga dan link aktif wajib disertakan dalam setiap usulan, meningkatkan kepercayaan diri penyusun dan memberikan manfaat langsung bagi SKPD. Selain mempercepat proses, aplikasi ini memastikan standar harga yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan harga barang dan jasa di Kabupaten Kutai Barat.
4. Implementasi aplikasi SIMAHAR dalam pengusulan standar harga barang dan jasa di BKAD Kabupaten Kutai Barat masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya komunikasi antar SKPD yang menyebabkan tidak adanya penetapan operator khusus, rendahnya pemahaman pengguna akibat minimnya pelatihan, ketidakstabilan jaringan internet di beberapa wilayah, serta rendahnya inisiatif dari beberapa pengguna untuk menyesuaikan diri dengan sistem baru. Hambatan-hambatan ini mengakibatkan proses pengusulan menjadi kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan, termasuk peningkatan komunikasi, penguatan infrastruktur teknologi, serta

penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi, guna memastikan keberhasilan penerapan aplikasi SIMAHAR secara optimal.

5.2 Saran

1. BKAD perlu mengadakan pertemuan rutin untuk membahas manfaat dan kemudahan penggunaan aplikasi SIMAHAR. Dengan langkah ini, BKAD dapat membantu SKPD yang masih merasa nyaman dengan proses manual untuk beralih ke sistem digital. Selain itu, BKAD juga harus memberikan pelatihan berkelanjutan agar para pengguna semakin mahir dan nyaman dalam menggunakan aplikasi.
2. BKAD harus meningkatkan koordinasi dan pemahaman antar aktor yang terlibat dalam implementasi SIMAHAR. BKAD perlu merumuskan secara jelas peran setiap aktor, baik PBMD, tim pengembang, SKPD, auditor, maupun Kepala Sub Bidang Kebutuhan dan Penatausahaan. Dengan demikian, alur kerja akan menjadi lebih efisien dan terorganisir. Selain itu, BKAD perlu mendokumentasikan alur dan prosedur yang jelas agar setiap pihak memahami tanggung jawab mereka.
3. BKAD harus memperkuat penggunaan fitur transparansi dalam SIMAHAR, seperti pengunggahan dokumen pembanding harga dan link aktif. BKAD juga perlu memperkenalkan sistem verifikasi otomatis untuk memastikan data yang dimasukkan valid dan sesuai dengan standar. Selain itu, BKAD harus memperkuat proses audit internal dengan menggunakan modul khusus dalam aplikasi untuk mempermudah pengawasan terhadap kesalahan atau penyimpangan harga.
4. BKAD perlu mengatasi kendala seperti kurangnya komunikasi antar SKPD, rendahnya pemahaman pengguna, dan masalah infrastruktur teknologi dengan cara meningkatkan komunikasi antar SKPD melalui rapat koordinasi reguler dan penunjukan operator khusus. Selain itu, BKAD harus memastikan peningkatan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan internet di wilayah yang belum stabil. BKAD juga harus



menyediakan akses pelatihan dan dukungan secara lebih intensif bagi seluruh pengguna aplikasi SIMAHAR.





DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, S. Z. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ahmadi, R. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Grindle, M.S 1980, *Politics and Policy Implementation in Third World*, New Jersey: Princeton University Press.
- Indrajit, R. E. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, R. E. 2006. *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Aptikom
- Milles, M.B, Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Mulyadi, M. 2007. *E-Government: Pengertian, Strategi, dan Implementasinya*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi, M. 2018. *Kemajuan dan Tantangan Implementasi E-Government di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Murdiyanto, E. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Nugroho, R. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, H. 2010, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A., Djojosoekarto, A. 2008. *E-procurement di Indonesia: pengembangan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik*. Kemitraan Partnership : LPSE Nasional
- Said, M.M. 2007. *Birokrasi Di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press
- Santoso, A. 2010. *E-Government dan Tantangan Implementasinya di Indonesia*. Surabaya: ITS Press
- Saragih, A. 2005. *E-Government di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, A.S. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta
- Winarno, B. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- Yudho, D. 2010. *Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: E-Government di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal:

- Asemi, Asefeh, Ali Safari, and A. Asemi Zavareh. *The role of management information system (MIS) and Decision support system (DSS) for manager's decision making process*. International Journal of business and management 6.7 (2011): 164-173.
- Budiman, Ilham Febri. *Transformasi Digital Di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sebagai Implementasi Good Governance*. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi 2.3 (2024): 70-78.
- Dewi, P.A.P.L., Animah, A., dan Mariadi, Y. 2021. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelola Keuangan*
- Erbara, A., Takdir, M. 2022. Systematic Literature Review: Implementasi Prinsip-prinsip Administrasi Keuangan Indonesia. 2(1), 1-10.
- Ja'o, M.A., Rengga, A., Luju, E. 2023. Analisis Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Anggaran pada Kantor Camat Waigate. 10(3), 50-60
- Khaerullah., Parawu, H.E., dan Tahir, N. 2023. *Efektivitas Pemanfaatan Aplikasi Simbakda di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar*
- Muskibah and Lili Naili Hidayah. *Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4.2 (2020): 175-194.
- Rahadian, A.H. 2019. *Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance pada Era Revolusi 4.0*
- Said, M.M. 2007. *Trend Global Peningkatan Pelayanan Publik: E-government dan Masalahnya Bagi Negara Sedang Berkembang*
- Said, M.M. 2009. *Menggagas Innovative Bureaucracy dalam Pemerintah Indonesia*
- Sandiasa, G., Agustana, P. 2018. *Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah*
- Shafira, A., Kurniasiwati, A. 2021. Implementasi E-Government dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo. 5(1), 52-68
- Sørensen, Claus Grøn, dkk. *Conceptual model of a future farm management information system*. Computers and electronics in agriculture 72.1 (2010): 37-47.
- Wakka, A.K. 2014, *Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, Vol. 3, No. 1

Sumber Hukum:

- Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengembangan *E-government*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional